

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal atau rasio kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah sangat kurang karena hanya memiliki rata-rata 8,71%. Hal ini berarti bahwa tingkat kemampuan keuangan Kota Kupang masih rendah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan rasio kamandirian daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 11,71% masih berada di antara 0-25%, tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kota Kupang dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari pihak ekstern yang masih cukup tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial daerah adalah milik pemerintah pusat.
2. Dalam membiayai belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja pegawai, sumber utamanya yaitu Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sangat kecil terhadap pembiayaan belanja-belanja tersebut dan lebih

banyak berasal dari bantuan pemerintah pusat. Rata-rata kontribusi PAD terhadap belanja pendidikan adalah 19,51%, untuk belanja kesehatan adalah 123,96%, dan untuk belanja pegawai adalah sebesar 13,40%. Hal ini disebabkan oleh total PAD sendiri yang sangat kecil meskipun terus meningkat setiap tahunnya dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat yang lebih besar.

6.2 Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan tentang kemampuan kemandirian keuangan daerah Kota Kupang, penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kontribusi kemampuan keuangan daerah dan kemandirian daerah sangat diperlukan agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi.
 - a. Intensifikasi
 - 1) Pemerintah Kota Kupang harus lebih tertib lagi dalam penetapan dan penyetoran pajak.
 - 2) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - 3) Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah.

b. Ekstensifikasi

- 1) Menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah.
- 2) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.
- 3) Masyarakat harus selalu mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bersifat membangun. Oleh karena itu, sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kupang harus benar-benar dikembangkan secara optimal agar tujuan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrozi, Akhmad Imam. 2013. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. II, No. 9. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Pemerintah Daerah*. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Dwirandra, A.A.N.B. 2008. *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002-2006*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. III, No. 2. Denpasar : Universitas Udayana.
- Fahri, Marratu. 2010. *Jurnal Vol. III, No. 5. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Urgensi Akuntabilitas Laporan Keuangan*.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Salemba Empat : Jakarta.
- Hidayat, Mochamad Fajar. 2013. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. Malang : Universitas Brawijaya.
- <http://kupangkota.bps.go.id>
- Iskandar, Maolana Amin. 2012. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006 – 2010)*. Skripsi. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Kartikasari, Rofiqoh. 2014. *Pengaruh Tingkat Kemandirian dalam Memenuhi Kebutuhan Fiskal Daerah, Tingkat Kemandirian dalam Mengelola Potensi Daerah dan SiLPA terhadap Tingkat Kinerja Pelayanan Publik (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2012)*. Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Ndadari, Laras Wulan dan Adi, Priyo Hari. 2008. “*Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat*”. The 2nd National Conference UKWMS. Surabaya.
- Nugroho, Adi. 2014. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi*

Jawa Tengah Periode 2010 – 2012. Jurnal. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 *tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 *tentang Klasifikasi Anggaran*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2007 *tentang Kebijakan Pengawasan*.

Rahman, Nikmah Astuti. 2014. *Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara* (Studi pada Kota Manado dan Kota Bitung Tahun 2008-2012). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Manado : Universitas Sam Ratulangi.

Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Sakti, Adhidian Fajar. 2008. *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Surakarta : Universitas Muhammadiyah.

Sholikhah, Ratna. 2011. *Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000 – 2009*. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

Suhadak dan Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang : Bayumedia dan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi FIA-Unibraw.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara*.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Daerah*.

- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 *tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1999 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah.* Insan Cendekia : Surabaya.
- Wulandari, Anita. 2001. *Kemampuan Keuangan Daerah.* Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 5 No. 2.
- Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal* (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008 – 2010). Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Yuliarti. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah.* Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPPYKPN.